

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MEMBUKA KEMBALI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)

Oleh

SUTAN MANOGARI SIAHAAN

Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, dalam melindungi hak-hak individu yang dirugikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Penghentian penyidikan oleh penyidik dinilai prematur, menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak korban. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu dasar penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan pertimbangan hakim praperadilan dalam memutuskan untuk membuka kembali penghentian penyidikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang didukung pendekatan empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik Polda Lampung, belum optimal dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga penghentian penyidikan tersebut dinilai prematur. Pertimbangan hakim secara aspek yuridis menurut fakta persidangan pengembalian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik karena alasan tidak cukup bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Secara filosofis, karena penghentian penyidikan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang mendasari penghentian penyidikan oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti, maka bentuk penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian adalah bentuk pelanggaran prosedural. Secara sosiologis, penghentian penyidikan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu dan merugikan para pencari keadilan.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan, dilakukan secara objektif dan menyeluruh guna menghindari penghentian penyidikan yang bersifat prematur dan melanggar hak-hak korban.

Kata kunci : Praperadilan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Pemalsuan Surat.

ABSTRACT

ANALYSIS OF PRETRIAL VERDICTS IN REOPENING THE INVESTIGATION OF THE CRIME OF FORGERY OF LETTERS

(Study of Decision Number 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)

By

SUTAN MANOGARI SIAHAAN

Pretrial functions as a social control mechanism, in protecting the rights of individuals who are harmed in the application of criminal law in Indonesia. The termination of the investigation by investigators was considered premature, causing legal uncertainty and violating the rights of victims. The problems in this study include two main things, namely the basis for the termination of the investigation carried out by the investigator and the consideration of the pretrial judge in deciding to reopen the termination of the investigation.

The research method used is a normative approach supported by an empirical approach. Data collection, namely primary data and secondary data with primary data sources, was obtained through interviews with Tanjung Karang District Court Judges, Lampung Regional Police Investigators and Criminal Law Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained from literature studies.

The results of this study show that the termination of the investigation by the Lampung Police investigators has not been optimal in collecting sufficient evidence so that the termination of the investigation is considered premature. The judge's consideration in the juridical aspect according to the facts of the trial returned the case file by the public prosecutor to the investigator for the reason that there was not enough evidence, it did not have binding legal force. Philosophically, because the termination of the investigation does not meet the elements of the article that underlie the termination of the investigation by the investigator on the grounds that there is insufficient evidence, the form of termination of the investigation carried out by the police is a form of procedural violation. Sociologically, the termination of an investigation that is not transparent has the potential to raise suspicions of certain interests and harm justice seekers.

The suggestion in this study is that it is expected for law enforcement officials to carry out the investigation process, carried out objectively and thoroughly to avoid premature termination of investigations and violation of victims' rights.

Keywords: *Pretrial, Investigation Termination Order, Forgery of Letters.*